

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PPID PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022

No	Isi Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila Informasi dibuka	Manfaat bila Informasi ditutup
1	Proses hukum PNS bermasalah	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
2	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
3	Data personal Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara detail	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h a	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial</li> <li>b. Kepentingan untuk penanganan rehabilitasi sosial</li> <li>c. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PPKS

ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 25 Pebruari 2022

  
 KEPALA DINAS,  
 NYTA BIANYTA REZZA, S.Sos  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 196712131989112001